

JATI DIRI

Tantangan Masa Tenang Pilkada

HAMPIR lima bulan masyarakat di berbagai daerah "menikmati" kampanye pilkada 2018. Rentang waktu itu tentu sangat cukup untuk mengenal calon kepala daerah.

Mulai dari sekadar nama, wajah, janji, dan juga sedikit karakter. Yang pernah dikunjungi secara langsung, mungkin, juga kecipratan secuil rezeki.

Besok (23/6) menjadi hari terakhir masa kampanye 17 pilgub, 39 pilwali, dan 115 pilbup dalam pilkada serentak 2018. Masa tenang dimulai sehari setelahnya, yakni 24-26 Juni 2018. Saat itu, penyelenggara pemilu akan membersihkan seluruh alat peraga kampanye yang tersebar. Pilkada memasuki masa tenang.

Hari itu pula menjadi batas akhir aktivitas kampanye bagi seluruh calon kepala daerah, wakil, serta tim sukses masing-masing. Masa tenang diharapkan memberikan waktu kepada masyarakat untuk berpikir dalam menentukan pilihan. Mereka tak boleh diganggu. Bahkan, aturan pidana dibuat untuk memagari masa tenang agar benar-benar steril dari aktivitas kampanye.



CHIS/JAWA POS

Tapi, aturan tetap saja benda mati. Di setiap masa tenang pemilihan umum, entah itu

Mewaspada Ideologi Radikal di Kampus

PERNYATAAN Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli bahwa hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme menarik perhatian masyarakat kampus. Apalagi, dia menyebut tujuh PTN besar tidak luput dari susunan paham radikal.

Belakangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir merencanakan upaya responsif yang akan mendaftarkan nomor telepon seluler dan media sosial mahasiswa. Selain itu, Menristekdikti akan meminta rektor untuk mendaftarkan pegawai, dosen, maupun mahasiswa yang terpapar radikalisme (*jpnn.com*, 7/6).

Bahaya Ideologi Radikal

Paham radikal atau ideologi radikal menurut pengertian kamus (*Langenscheidts Growörterbuch Deutsch, 1997*) secara sederhana mengacu pada keadaan atau orang dan gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh (*starke Veränderungen*) yang bukan tidak sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan kekerasan (*gewalt anzuwenden*), bukan dengan cara-cara damai. Karena pola pilihan gerakan yang tanpa kompromi dan bahkan dengan kekerasan itulah jelas sekali letak bahaya ideologi radikal tersebut.

Sayang, sering kali konotasi istilah itu di Indonesia dikaitkan dengan

agama tertentu. Radikalisme Islam, misalnya. Padahal, cara-cara tanpa kompromi dan kekerasan itu pada realitas historis bisa menempel ke siapa pun dan lembaga apa pun. Terlepas dari realitas historis-terminologis tersebut, bahaya ideologi radikal jelas akan bersinggungan dengan demokrasi dan kelangsungan negara-bangsa Indonesia.

Nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, pluralisme, dan hak asasi manusia akan tertantang dengan hadirnya pandangan radikal, fanatis, serta tanpa kompromi atas agama. Padahal, pandangan itu didasarkan pada interpretasi individual dan persepsi ajaran agama yang sempit.

Yang dikhawatirkan, pandangan seperti itu yang tumbuh merebak di kampus akan mewarnai corak pemahaman serta sikap mahasiswa dalam menjalani hidup bermasyarakat. Tentu, itu akan menjadi faktor penghancur sendi-sendi demokrasi Pancasila yang telah menjadi pilihan ideologi bangsa Indonesia.

Ideologi radikal juga akan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Bisa jadi akan berujung pada krisis kebangsaan dalam bentuk minimnya kesadaran akan apa sebenarnya konsep bangunan negara-bangsa Indonesia. Nasionalisme akan tertantang oleh ideologi radikal yang tidak memberikan ruang terhadap idiom "identitas nasional" yang semestinya dibangun



O i e h

KHOIRUN NIAM*

di atas pluralitas agama, suku, bahasa, dan budaya.

Karena bahayanya jelas, mewaspada ideologi radikal itu menemukan relevansinya. Namun, para pengambil kebijakan perlu memilih dan memilah langkah strategis dan sistemik yang tepat bagi kelangsungan pembelajaran yang kondusif dan berdaya guna bagi kepentingan investasi SDM pada masa depan.

Aspek ideologi radikal mana yang perlu diwaspadai, bahkan dilarang, juga mesti dipertimbangkan secara matang untuk menghindari terjebak pada langkah teknis yang tidak semestinya dilakukan pihak kampus seperti memata-matai nomor telepon seluler dan media sosial mahasiswa, pegawai, serta dosen.

Butuh Intelektualisme

Langkah strategis yang perlu dilakukan para penentu kebijakan adalah memberikan ruang tumbuh kembangnya iklim akademis dan

intelektualisme (Intelektualisme Yes) dan mempersempit atau bahkan meniadakan ruang ideologi radikal dalam arti gerakannya (Gerakan Ideologi Radikal No).

Pengkajian berbagai macam ideologi yang berkembang di dunia secara akademis mesti tetap perlu dilakukan. Ideologi apa pun dijadikan *subject matter* dalam proses pembelajaran. Sebagai lembaga keilmuan, tidak ada salahnya ideologi dijadikan objek kajian. Tentu dengan proses pengkajian yang multiperspektif dan dipraktikkan sebagai *ilmu untuk ilmu*.

Sumber informasi berupa buku yang berimbang perlu disediakan dalam rangka memberikan wacana seluas-luasnya kepada mahasiswa. Diberikan ruang untuk mendiskusikan temuan-temuan hasil pengkajian, baik secara tertutup maupun terbuka, di bawah bimbingan dosen.

Dikatakan tertutup kalau temuan masih memerlukan langkah validasi, pengujian, dan pembahasan internal. Baru setelah dinilai valid dan mempunyai nilai kebenaran ilmiah, temuan bisa disebarluaskan. Namun, dalam kaitannya dengan ideologi bangsa, perlu ada penyaringan terhadap ideologi yang tidak sesuai.

Iklim akademis seperti itu perlu diciptakan dalam rangka memenuhi tuntutan idealitas intelektual yang menurut Antonio Gramsci dapat berperan sebagai pencerah peradaban lewat ide, konsep, bingkai, dan

teoretik. Kampus harus berfungsi sebagai lembaga penyedia intelektual. Di samping itu, dari iklim akademis yang kondusif, diharapkan –sebagaimana diungkapkan Mudji Sutrisno– tampil cendekiawan organik dengan lingkungan pengolahan akademik dan penelitian yang tiap kali memberikan masukan untuk proses peradaban dari tingkat mikro semisal kampus yang mengolah terus model pendidikan sampai sebuah pusat kajian makro untuk perubahan-perubahan negara dalam tingkat putusnya (Mudji Sutrisno: 2002).

Namun, kampus harus mewaspada dan melakukan pengawasan, bahkan mungkin perlu pelarangan bertransformasinya paham intelektual ideologis menjadi gerakan ideologis radikal. Hal itu bisa dilakukan dengan cara pendampingan mahasiswa secara sistemik oleh dosen yang berkompeten dan otoritatif sehingga didengar serta dipatuhi mahasiswa.

Gagasan Azyumardi Azra yang menyarankan pemerintah memberikan ruang kembali bagi organisasi-organisasi ekstrakampus seperti HMI, PMII, dan IMM untuk masuk kampus menemukan titik urgensinya. Tujuannya, gerakan ideologi radikal yang sudah mencemari kampus bisa dilawan oleh organisasi-organisasi yang jelas-jelas beraliran religius nasionalis tersebut. (*)

*) Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya